

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

Shaqila Corrina Fayza
NPP. 31.0609
Asdaf Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Keuangan Publik

Email: shaqilacorrina14@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dadang Suwanda, SE., MM., MAK., Ak., CA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This study started from the problem whereas dependence of Kubu Raya Regency on transfer funds from central government because the Local Own Region is still low. **Purpose:** This study aims to analyse Local Own Revenue in supporting regency financial dependency during the fiscal years of 2020-2022, discover the inhibiting factors in Local Own Revenue increase and the efforts that has been done by Kubu Raya Regency Government in increasing Local Own Revenue. **Method:** This study uses a Descriptive Qualitative Method with Inductive Thinking Framework. The Theory used is The Financial Report Theory by Mahmudi (2019) with five ratio. The technique of collecting data are done by interviews (4 informants) and documentation. **Result:** According to the study which has been done it is showed that the level of regional financial independency in Kubu Raya Regency is still low. **Conclusion:** This is evidenced by the poor degree of decentralization, very high regional financial dependency, very low regional financial Independency accompanied by instructive relationship pattern, less effective Local Own Revenue but very efficient. It is recommended to provide facilities of tax collecting and optimize public service.*

Keywords: *Local Own Revenue Analysis, Region Independency*

ABSTRAK

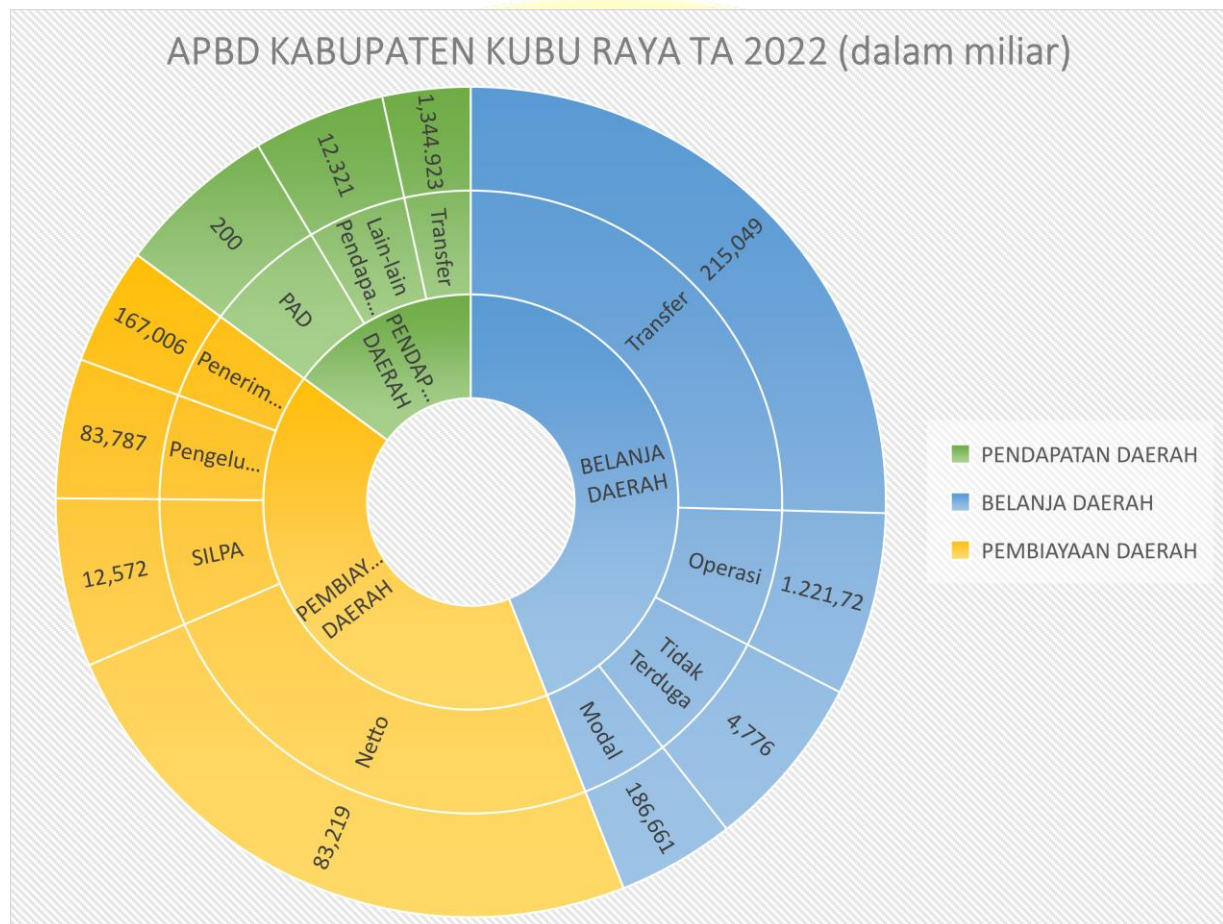
Permasalahan/Latar Belakang: Penelitian ini berangkat dari permasalahan yakni adanya ketergantungan Kabupaten Kubu Raya terhadap pendapatan transfer dari pusat karena PAD yang masih rendah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang kemandirian keuangan daerah selama tahun anggaran 2020-2022, mengetahui faktor penghambat dalam peningkatan PAD dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan PAD. **Metode:** Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan Kerangka Berpikir Induktif. Teori yang digunakan adalah Teori Analisis Laporan Keuangan menurut Mahmudi (2019) dengan lima rasio. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (4 informan) dan dokumentasi. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Kubu Raya masih rendah. Disarankan untuk menyediakan fasilitas untuk pemungutan pajak dan optimalisasi pelayanan publik.

Kata Kunci: Analisis Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur wewenang pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan daerahnya di segala bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang ini disebut sebagai otonomi daerah. Daerah otonom memiliki ciri utama yakni mampu mengelola keuangannya melalui eksplorasi potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan maksud untuk membiayai



penyelenggaraan urusan pemerintahan tanpa memiliki ketergantungan berlebihan terhadap bantuan dari pusat dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah (Halim, 2009:167). Adapun data APBD Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2022 lebih rinci disajikan pada gambar sebagai berikut:

Sumber: Diolah oleh penulis dari www.djpk.kemenkeu.go.id, 2023

Gambar 1
APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022

Gambar 1 menyajikan struktur APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah Kubu Raya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp200 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,3 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp12,3 miliar. Pada bagian belanja daerah mencakup belanja transfer yang berjumlah sekitar Rp215 miliar, belanja operasi sejumlah Rp1,2 triliun, belanja tidak terduga sejumlah Rp4,7 miliar, dan belanja modal sejumlah Rp186 miliar. Pembiayaan Daerah Kabupaten Kubu Raya terdiri dari penerimaan

pembiayaan mencapai Rp167 miliar, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp83,7 miliar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) mencapai Rp12,5 miliar, dan pembiayaan netto mencapai Rp83,2 miliar. Berfokus pada bagian pendapatan daerah, jumlah pendapatan transfer mencapai angka paling masif di antara dua komponen lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUBU RAYA”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan PAD untuk menunjang kemandirian keuangan daerah, salah satunya ialah kondisi geografis di Kabupaten Kubu Raya sangat berpengaruh dalam proses memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan mengakibatkan terjadinya keterbatasan mobilisasi. Kondisi geografis menjadi faktor penghambat karena di Kabupaten Kubu Raya terdiri dari beberapa sungai yang memisahkan kecamatan-kecamatan dengan jarak yang jauh serta medan yang harus dilewati tidak hanya perjalanan darat tetapi juga melewati air. Selain itu, pandemi yang melanda Indonesia membuat lumpuhnya perekonomian termasuk di Kabupaten Kubu Raya. Pendapatan masyarakat yang menurun juga menjadi satu di antara penyebab Pendapatan Asli Daerah ikut merosot dikarenakan kebijakan PPKM yang menyebabkan berbagai aktivitas ekonomi mandek.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks analisis PAD maupun kemandirian keuangan daerah. Penelitian Irma Suryani (2019) menunjukkan hasil bahwa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018 termasuk ke dalam kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah. Sementara itu, terdapat hasil penelitian yang ditinjau dari kabupaten/kota di Provinsi Banten yang rata-rata memiliki pola partisipatif dalam aspek kemandirian keuangan daerah sudah tergolong memuaskan namun masih terdapat ketimpangan antar daerah ditilik dari perhitungan derajat desentralisasi. 3 dari 7 daerah menunjukkan derajat desentralisasi minim sementara 4 lainnya tinggi. Selain itu, efektivitas pemungutan PAD khususnya pajak daerah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Banten mencapai angka di atas 100% (Tarnoto, Joko Tri Haryanto. 2018). Terdapat pula hasil penelitian di Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan status kemandirian daerah masih tergolong rendah yang dapat dilihat pada pola hubungan konsultatif dengan kontribusi yang kecil dari PAD terhadap APBD serta minimnya komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kepentingan PAD agar dapat menjadi penunjang kemandirian keuangan daerah (Dwi Purnamasari, Isnaini Rodiyah 2017). Selanjutnya, terdapat penelitian yang menyimpulkan pula bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan Kota Manado (Krest. D. Tolosang, 2018) yang memperkuat penelitian yang menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah dibandingkan sumer PAD lainnya (Nyoman Trisna Erawati, Leni Suzan. 2015). Paramitha Sandy Mokodompit, Sifrid S, Pangemaan, dan Ingrid Elim menemukan bahwa kemampuan desentralisasi dan tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kota Kotamobagu masih sangat rendah, Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengelolaan PAD terutama pada penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah (Paramitha Sandy Mokodompit dkk. 2014). Penelitian Mega Oktavia Ropa menemukan bahwa rasio efektivitas dan rasio efisiensi dikategorikan efektif dan kurang efisien sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan masih rendah. (Mega Oktavia Ropa, 2016). Penelitian Heri Faisal Harahap menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik namun jika dihitung menggunakan rasio kinerja keuangan menghasilkan nilai yang rendah (Heri Faisal Harahap,2020). Penelitian Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar menemukan bahwa

realisasi penerimaan PAD di Kota Malang memiliki kategori sangat efektif yang artinya Pemerintah Kota Malang cukup maksimal di dalam menggali potensi PAD yang ada, namun ketergantungan terhadap dana dari pusat cukup tinggi. (Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Kamilaus Konstase Oki dkk tentang analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belu bahwa masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membantu penyelenggaraan otonomi daerah, di Kabupaten Belu memiliki nilai strategis baik ekonomi maupun politik serta memiliki sumber daya alam dengan potensi yang sangat baik, diperlukan perhatian khusus dalam memanfaatkan dan memaksimalkan sumber pendapatan tersebut untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Kamilaus Konstase Oki dkk,2020) pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang dinilai berpotensi dalam meningkatkan pendapatan bagi setiap daerah agar terciptanya kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya bertujuan sebagai pembeda antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan Rasio Efisiensi dari Teori Analisis Laporan Keuangan Mahmudi (2019) yang pada penelitian sebelumnya hanya terbatas empat rasio perhitungan yakni sampai Rasio Efektivitas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas bagaimana kontribusi PAD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah.

II. METODE

Penelitian pada penyusunan karya tulis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan Kerangka Berpikir Induktif untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama empat informan dan dokumentasi. Teknik analisis data merujuk pada Model Miles dan Huberman serta menggunakan perhitungan rasio dari Teori Analisis Laporan Keuangan Mahmudi (2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kontribusi PAD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya menggunakan lima perhitungan rasio dari Teori Analisis Laporan Keuangan Mahmudi (2019). Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan suatu kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna membiayai otonomi daerah. Rasio ini dapat dihitung dan diperoleh dengan membandingkan antara jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat diperoleh melalui rumus:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas derajat desentralisasi menunjukkan perbandingan antara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut perhitungan rasio derajat desentralisasi Kabupaten Kubu Raya:

$$2020 = \frac{151.009.789.228}{1.477.080.851.351} \times 100\% = 10,22\%$$

$$2021 = \frac{160.894.591.482}{1.553.468.400.345} \times 100\% = 10,35\%$$

$$2022 = \frac{200.314.165.508}{1.557.558.858.426} \times 100\% = 12,86\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan hasil pada tahun 2020 menyentuh angka 10,22% selanjutnya pada tahun 2021 meningkat ke angka 10,35% dan melonjak cukup signifikan mencapai 12,86% di tahun 2022.

Tabel 1
Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2020	151.009.789.228	1.477.080.851.351	10,22 (Kurang)
2021	160.894.591.482	1.553.468.400.345	10,35 (Kurang)
2022	200.314.165.508	1.557.558.858.426	12,86 (Kurang)
Rata-rata			11,16 (Kurang)

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kubu Raya tahun 2020-2022

Jika dihitung jumlah rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kubu Raya dari tahun anggaran 2020-2022 maka diperoleh nilai sebesar 11,14% yang masuk ke interval 10%-20% sehingga tergolong dalam kriteria Kurang.

3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, penulis menggunakan rumus Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Pada dasarnya tujuan dari perhitungan menggunakan rasio ini sama dengan rasio kemandirian keuangan, yaitu untuk mengukur seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer.

Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan Rasio Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan hasil perhitungan yang menunjukkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022:

$$2020 = \frac{1.040.956.520.388}{1.477.080.851.351} \times 100\% = 70,47\%$$

$$2021 = \frac{1.310.650.071.331}{1.553.468.400.345} \times 100\% = 84,36\%$$

$$2022 = \frac{1.344.923.091.240}{1.557.558.858.426} \times 100\% = 86,34\%$$

Tabel 2

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kubu Raya Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2020	1.040.956.520.388	1.477.080.851.351	70,47% (Sangat Tinggi)
2021	1.310.650.071.331	1.553.468.400.345	84,36% (Sangat Tinggi)
2022	1.344.923.091.240	1.557.558.858.426	86,34% (Sangat Tinggi)
Rata-rata			80,39 (Sangat Tinggi)

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kubu Raya tahun 2020-2022

Hasil persentase perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dari tahun 2020-2022 secara keseluruhan menunjukkan nilai yang berada pada angka lebih dari 50% dengan rata-rata sebesar 80,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya termasuk kriteria Sangat Tinggi dan harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan tersebut ditentukan oleh besar kecilnya rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan dengan hasil yang tinggi menunjukkan rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pihak eksternal dan sebaliknya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung besaran tingkat rasio kemandirian Keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian\ Daerah = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, rasio kemandirian Keuangan daerah dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan besaran dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ditambah pinjaman dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan tingkat kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2022:

$$2020 = \frac{151.009.789.228}{1.040.956.520.388} \times 100\% = 14,50\%$$

$$2021 = \frac{160.894.591.482}{1.310.650.071.331} \times 100\% = 12,27\%$$

$$2022 = \frac{200.314.165.508}{1.334.923.091.240} \times 100\% = 15\%$$

Selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kubu Raya Tahun 2020-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2020	151.009.789.228	1.040.956.520.388	14,50% (Rendah Sekali)
2021	160.894.591.482	1.310.650.071.331	12,27% (Rendah Sekali)
2022	200.314.165.508	1.334.923.091.240	15% (Rendah Sekali)
Rata-rata			13,92% (Rendah Sekali)

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kubu Raya tahun 2020-2022

Hasil dari perhitungan kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2020-2022 rata-rata berada pada nilai 13,92%. Berdasarkan kriteria yang disebutkan oleh para ahli, persentase kemandirian daerah yang berada pada angka 0-25% menunjukkan tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah masih Rendah Sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pola hubungan instruktif. Artinya, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial yang masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Dana transfer yang dikirimkan oleh pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan dan menjadi sumber dana utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam membiayai seluruh kegiatan dan menjalankan roda pemerintahannya.

3.4 Rasio Efektivitas

Pengukuran kemandirian keuangan juga menggunakan perhitungan analisis Rasio Efektivitas. Rasio Efektivitas bertujuan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah diperoleh dengan cara membandingkan antara target Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut Rumus Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Kubu Raya tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

$$2020 = \frac{151.009.789.228}{160.118.773.169} \times 100\% = 88,09\%$$

$$2021 = \frac{160.894.591.482}{165.340.377.149} \times 100\% = 74,12\%$$

$$2022 = \frac{200.314.165.508}{189.985.654.914} \times 100\% = 82,5\%$$

Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Rasio Efektivitas Kubu Raya Tahun 2020-2022

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas
2020	151.009.789.228	160.118.773.169	88,09% (Kurang Efektif)
2021	160.894.591.482	165.340.377.149	74,12% (Tidak Efektif)
2022	200.314.165.508	189.985.654.914	82,5% (Kurang Efektif)
Rata-rata			81,57% (Kurang Efektif)

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kubu Raya tahun 2020-2022

Merujuk pada hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa Rasio Efektivitas Kabupaten Kubu Raya cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif selama tiga tahun anggaran terakhir. Persentase terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu hanya sebesar 74,12%. Kemudian meningkat di tahun 2022 dengan nilai 82,5%. Jika dilihat dari rata-rata tiga tahun terakhir maka Rasio Efektivitas berada pada angka 81,57% yang masuk dalam kriteria Kurang Efektif.

3.5 Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui efisiensi keuangan Kabupaten Kubu Raya, didapat dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima pada tahun berkenaan. Rumus perhitungan Rasio Efisiensi dituangkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan dan grafik rasio Efisiensi Kabupaten Kubu Raya tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

$$2020 = \frac{5.092.448.439}{151.009.789.228} \times 100\% = 3,37\%$$

$$2021 = \frac{4.920.123.203}{160.894.591.482} \times 100\% = 3,05\%$$

$$2022 = \frac{6.101.983.900}{200.314.165.508} \times 100\% = 3,04\%$$

Jika dituangkan dalam bentuk tabel dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 5
Rasio Efisiensi Kubu Raya Tahun 2020-2022

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi
2020	5.092.448.439	160.118.773.169	3,37% (Sangat Efisien)
2021	4.920.123.203	165.340.377.149	3,05% (Sangat Efisien)
2022	6.101.983.900	189.985.654.914	3,04% (Sangat Efisien)
Rata-rata			3,15% (Sangat Efisien)

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kubu Raya tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel dari hasil perhitungan, angka 3% konsisten dicapai selama tiga tahun terakhir. Jika dihitung rata-rata efisiensi Kabupaten Kubu Raya maka akan menghasilkan angka 3,15% yang berarti kurang dari 10% sehingga masuk ke dalam kriteria Sangat Efisien.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis Pendapatan Asli Daerah berguna untuk menelisik sejauh mana tingkat kemandirian keuangan daerah yang sudah dicapai Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan otonomi daerah. Penulis menemukan temuan penting yakni kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan suatu daerah sama halnya dengan temuan pada penelitian Irma Suryani (2019). Hasil yang tidak maksimal pada rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah dipengaruhi oleh belum maksimalnya penerimaan PAD (Paramitha Sandy Mokodompit dkk. 2014). Berbeda dengan penelitian Mega Oktavia Ropa yang pada hasil pengukuran rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah didapat bahwa Kabupaten Minahasa Selatan cukup efektif dalam merealisasikan PAD namun tidak efisien dalam menggunakan anggaran tetapi kemandirian keuangan daerahnya rendah (Mega Oktavia Ropa, 2016). Hasil temuan pada penelitian penulis bahwa Pemerintah daerah Kubu Raya masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer yang dibuktikan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah Kubu Raya dari perhitungan rasio masih rendah sehingga temuan ini memperkuat temuan pada penelitian sebelumnya.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam analisis PAD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya yaitu keadaan geografis Kubu Raya yang memiliki kecamatan tersebar jauh sehingga terpisahkan oleh jarak dan kesulitan medan karena sebagian besar harus menggunakan transportasi air sehingga menyebabkan keterbatasan mobilisasi. Selain itu juga pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi lumpuh dan masih memerlukan waktu untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis PAD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kubu Raya bahwa Kubu Raya dinilai belum sepenuhnya mandiri. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi PAD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya yang diperoleh melalui perhitungan lima rasio sesuai dengan teori Mahmudi (2019) dengan rata-rata hasil dari tiga tahun anggaran Kabupaten Kubu Raya yakni tahun 2020-2022. Rasio Derajat Desentralisasi sebesar 11,14% pada kriteria Kurang. Rasio Ketergantungan Daerah pada angka 80,39% yang masuk dalam kriteria Sangat Tinggi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 13,92% pada kriteria Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif. Rasio Efektivitas pada angka 81,57% yang masuk dalam kriteria Kurang Efektif. Rasio Efisiensi sebesar 3,15% yang masuk dalam kriteria Sangat Efisien. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan PAD untuk menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya, yaitu keadaan geografis yang mengakibatkan keterbatasan mobilisasi dan pandemi Covid-19.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang diberikan sangat singkat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis PAD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah di Kubu Raya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kubu Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan

penelitian atas kesediaan waktu, tempat, dan informasi terkait penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Kubu Raya dalam Angka Tahun 2023*. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, 2004.
- Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition. Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Komarudin, (2001). *Ensiklopedia Manajemen, Edisi IX*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyana, Budi. 2006. *Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia. Edisi Pertama*, Jakarta : LPKPAP.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Neuman. L. (2006). *Basics of social research qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Oki, K. dkk. (2020) *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2) <https://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/584/328>
- Purnamasari, D., & Rodiyah, I. (2019). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010 – 2014*. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.814>
- Reza Fachmil Azhar. (2023). *Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Kemandirian Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*. IPDN. <https://eprints.ipdn.ac/14245>
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sinurat, Marja. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahmat
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Suhandak, & Trilaksono. (2007). *Paradigma Baru, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD di Era Otonomi*.
- Suryani, I. (2019). *Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2) <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/2673/1802>
- Tarnoto, Joko Tri Haryanto. (2018). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015*. *Jurnal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan* www.djpk.kemenkeu.go.id
- Widjaja, (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2022*
- Laporan Realisasi Anggaran Kubu Raya Tahun 2020-2022*